



ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)* DI KABUPATEN SLEMAN

STAKEHOLDER ANALYSIS IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN SLEMAN DISTRICT

Septiana Wulan Dari¹, Kurnia Nur Fitriana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 29-01-24

Diperbaiki 02-02-24

Disetujui 06-02-24

Kata Kunci:

Analisis stakeholder,
Sustainable Development
Goals, Pengentasan
Kemiskinan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis *stakeholder* dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 *stakeholder* dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman, *stakeholder* diklasifikasikan menjadi: 1) *Key Player*, Bappeda Kabupaten Sleman yang menjadi koordinator dalam penyusunan RAD, mengevaluasi RPJM. Dinsos Kabupaten Sleman melakukan pendataan serta penyaluran bantuan agar tepat sasaran; 2) *Subject*, Dinas PMK Kabupaten Sleman mengkoordinasikan semua *stakeholder* yang terlibat agar pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman bisa berjalan di tingkat Kalurahan; 3) *Context Setter*, Universitas Amikom Yogyakarta memberikan beasiswa kepada masyarakat KPM, dan TKPK Kabupaten Sleman memiliki kontribusi dalam menyusun Dokumen RPKD, RAP, serta berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan juga menerima advokasi dari masyarakat; dan 4) *Crowd*, LSM SATUNAMA Yogyakarta memberikan pelatihan dan juga bantuan kepada masyarakat, Koordinator PKH Kabupaten melakukan koordinasi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Sementara Masyarakat KPM merupakan *stakeholder* yang memiliki peran sangat minim, hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa dalam proses pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman perannya sangat memiliki pengaruh dan dampak yang besar. Kesimpulan pada penelitian ini terdapat empat klasifikasi *stakeholder* dengan peran, kekuatan, dan kepentingan yang berbeda dari setiap *stakeholder*. Hasil penelitian ini memberikan implikasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait perbedaan kepentingan antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to explain stakeholder analysis in achieving SDGs on goal 1 in Sleman Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The results showed that there are 8 stakeholders in achieving SDGs on goal 1 in Sleman Regency, stakeholders are classified into: 1) Key Player, Sleman Regency Bappeda, which is the coordinator in the preparation of RAD, evaluates RPJM. Social Services of Sleman Regency conducts data collection and distribution of assistance so that it is right on target; 2) Subject, Sleman Regency PMK Office coordinates all stakeholders involved so that the achievement of SDGs on goal 1 in Sleman Regency can run at the Kalurahan level; 3) Context Setter, Amikom University Yogyakarta provides scholarships to the KPM community, and TKPK Sleman Regency has contributed in preparing the RPKD Document, RAP, and contributes in conducting evaluations and also receiving advocacy from the community; and 4) Crowd, NGO SATUNAMA Yogyakarta provides training and assistance to the community, the District PKH Coordinator coordinates at the District and Sub-district levels. Meanwhile, the KPM community is a stakeholder that has a very minimal role, this is evidenced by the low awareness of the community that in the process of achieving SDGs in goal 1 in Sleman District, their role has a great influence and impact. The conclusion of this research is that there are four classifications of stakeholders with different roles, strengths, and interests of each stakeholder. The results of this study provide implications in solving problems related to differences in interests between the government, the private sector, and also the community.

Keywords:

Stakeholder analysis,
Sustainable Development
Goals, Poverty Alleviation

1. Pendahuluan

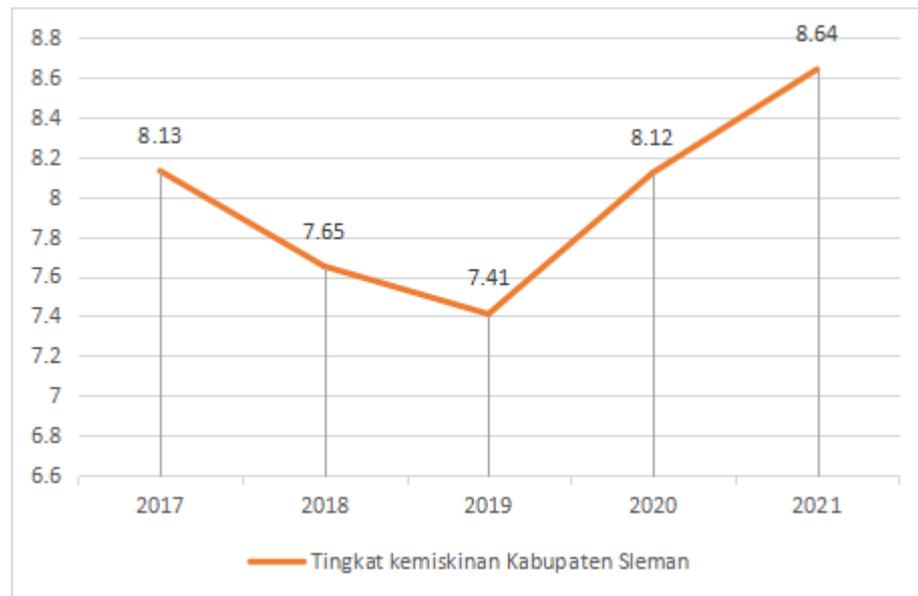
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial bagi beberapa negara berkembang di dunia tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan diartikan sebagai salah satu masalah dengan standar hidup yang rendah, kurangnya materi pada individu atau kelompok tertentu dibandingkan dengan standar kehidupan yang ada dalam masyarakat (Tikawati & Lestari, 2019: 60). Menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa per Juni 2022. Penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 tercatat sebesar 26,36 juta orang, akan tetapi per September 2022 Badan Pusat Statistik mengklaim bahwa tingkat kemiskinan kembali naik 0,03 persen sehingga menjadi 9,57 persen dari 9,54 persen per Maret 2022. Tingkat kemiskinan Indonesia yang semula diklaim menurun dari periode 2011 hingga 2022, sehingga tingkat kemiskinan dianggap mengalami peningkatan menurut Bank Dunia bermula dari 54 juta orang penduduk miskin menjadi 67 Juta orang. Berdasarkan pada data di atas dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah kemiskinan yang relatif tinggi.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki penduduk miskin sebesar 463,63 Ribu jiwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, dilihat dari angka kemiskinan secara nasional menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Provinsi termiskin di pulau Jawa dengan angka kemiskinan sebesar 11,49%. Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 8,64 persen, atau naik 0,52 persen dalam satu tahun. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 dilihat dari pengeluaran per kapita per bulan yakni mencapai 108,93 ribu orang (8,64 persen). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, besaran nilai kebutuhan hidup minimum yakni ditentukan berdasarkan Garis Kemiskinan.



Gambar 1. Perkembangan Garis Kemiskinan Maret 2017-Maret 2021
Sumber: Susenas Maret 2017 - Maret 2021

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa terjadinya peningkatan Garis Kemiskinan pada Maret 2017 - Maret 2021. Garis Kemiskinan Kabupaten Sleman sebesar Rp422.933 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 dimana Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp411.610 per kapita per bulan, terlihat adanya peningkatan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 2,75 persen. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman cukup fluktuatif, akan tetapi dalam kurun waktu setahun terakhir terjadi kenaikan yang signifikan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, penduduk miskin di Kabupaten Sleman sebanyak 108,93 ribu orang, dibandingkan dengan hasil Susenas Maret 2020 jumlah penduduk miskin pada waktu itu hanya 99,78 ribu orang, tentu adanya kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman sebanyak 9,15 ribu orang atau naik 9,17 persen.



Gambar 2. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sleman Maret 2017-Maret 2021
Sumber: Susenas Maret 2017 - Maret 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun sampai dengan tahun 2019, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi ini menggambarkan usaha pemerintah Kabupaten Sleman belum berhasil dalam pengentasan kemiskinan, bukan hanya pemerintah, pihak swasta dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan. *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan lanjutan dari pembangunan milenium yang biasa dikenal dengan *Millenium Development Goals (MDGs)* yakni hasil dari konferensi pada tahun 2000 yang diikuti oleh 189 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu tujuan utama yang dimuat dalam *Millenium Development Goals* adalah mengurangi jumlah penduduk miskin (Wahyuningsih, 2017). *MDGs* ini kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2030. Konsep dari *SDGs* ini sendiri disusun atas beberapa dimensi yakni dimensi ekonomi, kelembagaan, lingkungan, serta dimensi sosial. *SDGs* memiliki 17 tujuan dan beberapa indikator dalam pengukurannya. Dalam penerapan *SDGs*, kemiskinan masih menjadi masalah serius (Pratama & Purnomo, 2020). Tujuan pertama dari 17 tujuan *SDGs* adalah *no poverty* atau mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun dan di manapun. Tujuan ini kemudian menjadi latar belakang tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya seperti pariwisata, energi, pangan, infrastruktur, dan lainnya (Bappenas, 2023). Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dalam pasal 18 ayat (1) bahwa: Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan daerah membentuk tim penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki komitmen terhadap *SDGs* dengan berorientasi pada kepentingan, kemandirian, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung pencapaian tujuan 1 *SDGs*, Kabupaten Sleman membentuk tim penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat Kapanewon, Kalurahan, hingga

Padukuhan yang mana melibatkan beberapa *stakeholder*. Pemangku kepentingan atau biasa dikenal *stakeholder* merupakan individu atau kelompok yang bisa berpengaruh atau terpengaruh oleh suatu tujuan dari sebuah organisasi (Freeman dalam Loetvy, *et al.*, 2023). Dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Sleman merupakan pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Guna mencapai tujuan dari pengentasan kemiskinan ini kemudian dinas sosial Kabupaten Sleman melakukan kerja sama kepada pihak swasta dan juga masyarakat.

Untuk mencapai *SDGs* di Kabupaten Sleman terutama pada tujuan 1 *no poverty* Pemerintah Kabupaten Sleman selalu berupaya dan bekerja keras untuk meningkatkan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak-pihak yang mempunyai tujuan yang sama untuk membangun Sleman menjadi lebih baik. Akan tetapi Seperti halnya yang peneliti ketahui bahwa pada proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman yang mana *stakeholder* yang terlibat masih memiliki perbedaan visi misi dan tujuan. Selama ini *stakeholder* masih berjalan sendiri-sendiri dan cenderung berorientasi pada kepentingan masing-masing. Untuk menciptakan perubahan diperlukan energi yang bisa disatukan, akan tetapi masih terhambat oleh beberapa karakter sektoral di dalam perencanaan dan pelaksanaan program, belum adanya kekuatan kontribusi *stakeholder* dalam pencapaian *SDGs* di Kabupaten Sleman hal ini didukung dengan pernyataan wakil bupati Kabupaten Sleman sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bahwa masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua *stakeholder*, kemudian ditegaskan kembali bahwa Pemerintah terus berupaya melakukan koordinasi dan kolaborasi serta berharap dukungan dari seluruh *stakeholder* agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman sehingga mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Sleman sesuai tujuan 1 *SDGs* (Harian Jogja, 2022).

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman masih terdapat kendala dalam pengentasan kemiskinan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Analisis *stakeholder* dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab uraian permasalahan diatas terkait siapa saja aktor yang berpengaruh dan mempengaruhi dalam pencapaian *SDGs* tujuan 1 *no poverty* di Kabupaten Sleman, untuk menganalisa *stakeholder* yang terlibat berdasarkan indikator kekuatan dan kepentingan *stakeholder* (Ni'mah, *et al.*, 2019: 57). Diperlukan adanya analisis *stakeholder* sebagai salah satu proses untuk mengetahui *stakeholder* yang dipengaruhi dan mempengaruhi sehingga dapat menyusun strategi kedepannya yang lebih potensial guna mengetahui kebutuhan dari masing masing *stakeholder* dalam proses pencapaian *SDGs* tujuan 1 *no poverty* di Kabupaten Sleman. Penelitian ini sejalan dengan teori analisis *stakeholder* oleh Bryson, *et al.*, (2016) dimana analisis *stakeholder* ini dilakukan untuk memahami kekuatan dan juga kepentingan *stakeholder*. Analisis *stakeholder* ini juga merupakan langkah untuk mengetahui kekuatan, dan kepentingan dari masing-masing *stakeholder* dalam pencapaian *SDGs* tujuan 1 di Kabupaten Sleman.

2. Metode Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dengan desain ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis dan mendalam dengan mengumpulkan data-data melalui observasi, wawancara, dan dokumen lainnya terkait analisis *stakeholder* dalam pencapaian *SDGs* di Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Program Keluarga Harapan Kabupaten Sleman, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sepeda Mas Kabupaten Sleman, Universitas Amikom Yogyakarta, dan Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, serta masyarakat KPM. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023, mulai dari pengambilan data, pengolahan data, penyajian data hingga menghasilkan laporan penelitian. Subjek penelitian ini yaitu: Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Perencana Ahli Muda bidang Perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Sleman, Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Sleman, Pengurus harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sepeda Mas Kabupaten Sleman, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMK Kabupaten Sleman, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Amikom Yogyakarta, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kategori balita dan anak sekolah (SMP dan SMA). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

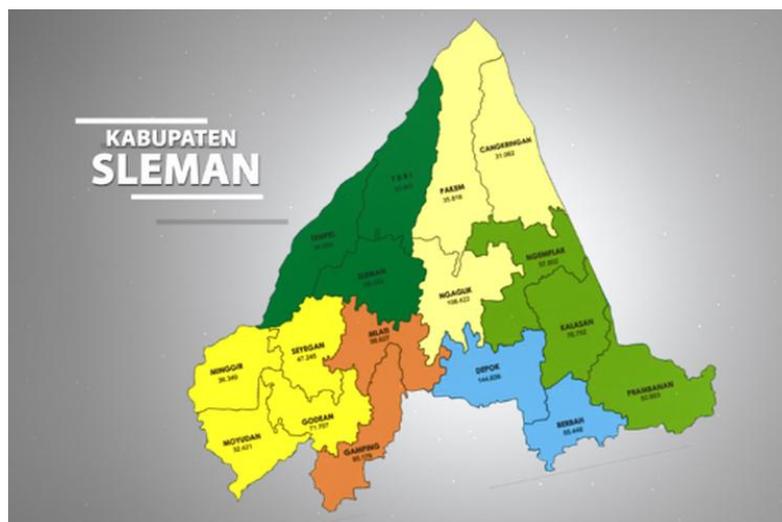
3. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Sleman memiliki jumlah kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni sebanyak 30,69% (Bappeda Sleman, 2023). Jumlah penduduk Kabupaten Sleman dengan pengelompokan berdasarkan usia dan jenis kelamin cukup padat dan heterogen mulai dari balita, dewasa, hingga lansia. Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi DIY yang memiliki beberapa potensi ekonomi, antara lain yakni pertanian perkebunan, industri, perdagangan dan jasa, serta sektor pariwisata. Hal tersebut tentunya perlu dukungan serta beberapa bantuan dari pemerintah guna pengembangan sektor-sektor tersebut, terutama guna mewujudkan sektor basis yang ada di wilayah Sleman khususnya. Akan tetapi di Kabupaten Sleman kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang masih hidup dibawah garis kemiskinan termasuk, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya saja mereka masih mengalami kesulitan. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta dan dapat dibedakan menjadi 3 sebagai :

- a. Wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta, yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik, Ngemplak, Kalasan, Berbah, Sleman, dan Mlati.

- b. Wilayah sub-urban, meliputi Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
- c. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (buffer zone) meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Kabupaten Sleman memiliki kondisi ekonomi yang cenderung rendah, kondisi ekonomi masyarakat ini tentu menjadi gambaran kondisi kemiskinan masyarakat tertentu. Untuk melihat kondisi ekonomi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada peta kemiskinan berikut:



Gambar 3. Peta Kemiskinan Kabupaten Sleman Tahun 2020
Sumber: dinpmk.slemankab.go.id, 2023

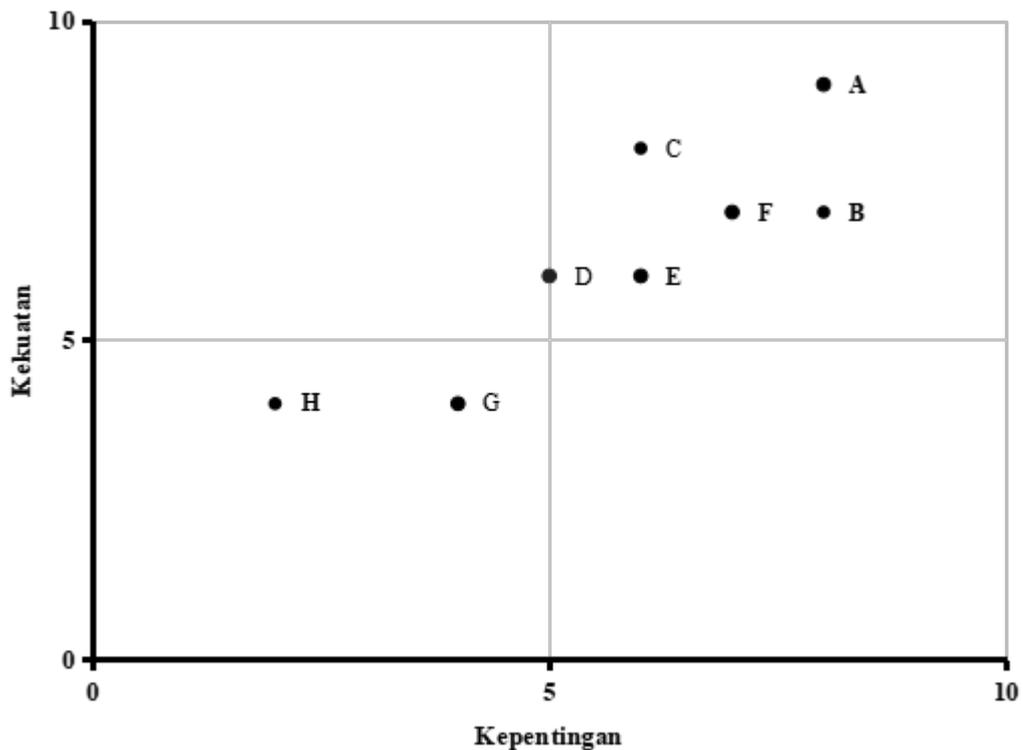
Pada peta tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi atau termasuk dalam kategori I adalah Kecamatan Depok, Mlati, serta Gamping. Ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang dilalui oleh jalan-jalan nasional dan provinsi dengan mayoritas aktivitas kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa. Perkembangan pada ketiga kecamatan tersebut memicu pertumbuhan wilayah sekitarnya. Terbukti dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Godean, Kalasan, dan Berbah masuk dalam kategori II atau wilayah yang memiliki kepadatan sedang. Terjadinya pemusatan penduduk di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman membentuk suatu kawasan perkotaan.

Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami oleh rumah tangga atau seseorang, sehingga tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan yang layak bagi kehidupannya (BPS). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman jika dilihat dari persentase KK miskin mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode tahun 2014-2019. Angka kemiskinan Kabupaten Sleman berhasil turun sebesar 0,9 persen dari tahun 2021. Angka kemiskinan di Kabupaten Sleman di tahun 2022 lalu mencapai 7,74 persen atau sebesar 98,93 ribu jiwa.

Masalah penanganan kemiskinan yang sampai saat ini terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, salah satunya dengan cara melakukan kerjasama antar *stakeholder* dalam mencapai tujuan 1 *Sustainable Development Goals*. Dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 *stakeholder* dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman, *stakeholder* diklasifikasikan menjadi: 1) *Key Player*, Bappeda Kabupaten Sleman yang menjadi koordinator dalam penyusunan RAD, mengevaluasi RPJM. Dinsos Kabupaten Sleman melakukan pendataan serta penyaluran bantuan agar tepat sasaran; 2) *Subject*, Dinas PMK Kabupaten Sleman mengkoordinasikan semua *stakeholder* yang terlibat agar pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman bisa berjalan di tingkat Kalurahan; 3) *Context Setter*, Universitas Amikom Yogyakarta memberikan beasiswa kepada masyarakat KPM, dan TKPK Kabupaten Sleman memiliki kontribusi dalam menyusun Dokumen RPKD, RAP, serta berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan juga menerima advokasi dari masyarakat; dan 4) *Crowd*, LSM SATUNAMA Yogyakarta memberikan pelatihan dan juga bantuan kepada masyarakat, Koordinator PKH Kabupaten melakukan koordinasi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Sementara Masyarakat KPM merupakan *stakeholder* yang memiliki peran sangat minim, hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa dalam proses pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman perannya sangat memiliki pengaruh dan dampak yang besar. Kesimpulan pada penelitian ini terdapat empat klasifikasi *stakeholder* dengan peran, kekuatan, dan kepentingan yang berbeda dari setiap *stakeholder*.

Pemetaan *stakeholder* berdasarkan tingkat kekuatan dan tingkat kepentingan *stakeholder* dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman diperoleh kategori sebagai berikut: 1) *Key Player*, Bappeda Kabupaten Sleman, Dinsos Kabupaten Sleman; 2) *Subject*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Sleman; 3) *Context Setter*, Universitas Amikom Yogyakarta dan TKPK Kabupaten Sleman; 4) *Crowd*, LSM SATUNAMA Yogyakarta, Koordinator PKH Kabupaten Sleman, dan Masyarakat KPM. Pemetaan *stakeholder* diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Pemetaan *stakeholder* dalam Pencapaian *SDGs* di Kabupaten Sleman
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2023

Keterangan:

- A. Dinas Sosial Sleman (8,9)
- B. Bappeda Sleman (8,7)
- C. Dinas PMK Sleman (6,8)
- D. Koordinator PKH Sleman (5,6)
- E. Universitas Amikom Yogyakarta (6,6)
- F. TKPK Sepeda Mas Kabupaten Sleman (7,7)
- G. Yayasan SATUNAMA Yogyakarta (4,4)
- H. Masyarakat KPM (2,4)

Berdasarkan matriks *power* dan *interest* diatas, dapat diketahui bahwa *stakeholder* dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

1. Key Players (Kekuatan - Tinggi, Kepentingan - Tinggi). Kelompok kategori key players adalah Bappeda Kabupaten Sleman, dan Dinsos Kabupaten Sleman. *stakeholder* dalam kelompok ini merupakan pelaku utama dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman. Selain memiliki kekuatan dan kepentingan yang tinggi juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan Kabupaten Sleman.
2. Subject (Kekuatan - Rendah, Kepentingan - Tinggi). Kelompok kategori subject adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Sleman. Dinas PMK sangat berkepentingan atas tercapainya *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman, akan tetapi kekuatan dimiliki rendah.

3. Context Setter (Kekuatan - Tinggi, Kepentingan - Rendah). Kelompok kategori context setter adalah Universitas Amikom Yogyakarta dan TKPK Kabupaten Sleman. *stakeholder* dalam kelompok ini memiliki kekuatan yang tinggi akan tetapi pada dasarnya kepentingan atas tercapainya *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman rendah.
4. Crowd (Kekuatan - Rendah, Kepentingan - Rendah). Kelompok kategori ini adalah LSM SATUNAMA Yogyakarta, Koordinator PKH Kabupaten Sleman, dan Masyarakat KPM. Kelompok *stakeholder* ini memiliki kepentingan dan juga kekuatan yang rendah dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan Pencapaian *Sustainable Development Goals* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman melibatkan 8 *stakeholder* diantaranya terdiri dari unsur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, dan juga masyarakat. Unsur pemerintah yang terlibat dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Sleman, TKPK Sepeda Mas Kabupaten Sleman, Koordinator PKH Kabupaten Sleman. Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman adalah Yayasan SATUNAMA Yogyakarta. Unsur Akademisi yang terlibat adalah Universitas Amikom Yogyakarta. Unsur masyarakat yang terlibat dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman adalah Anggota Program Keluarga Harapan. Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan menjadikan kebijakan tersebut sebagai skala prioritas. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman dilakukan dengan menurunkan angka kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan. *Stakeholder* yang terlibat memiliki peran, kekuatan dan juga kepentingan masing-masing dalam pencapaian *SDGs* terutama pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman.

Pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman dikatakan berhasil adalah ketika terciptanya kerja sama yang baik, dan berkelanjutan antar *stakeholder* yang terlibat. Upaya dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah, LSM, dan juga masyarakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan sosial seperti yang tercantum pada Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulan Kemiskinan, Peraturan Daerah ini dibuat agar mampu memberikan perlindungan sosial, dan juga

pemberdayaan keluarga miskin. Akan tetapi pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya berhasil, masih terdapat beberapa catatan-catatan diantaranya rendahnya kesadaran Sumber daya Manusia, Peran masyarakat juga belum maksimal karena adanya keterbatasan kemampuan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas, dan keterbatasan modal, sehingga dalam membuat kreatifitas masyarakat membutuhkan modal serta adanya sosialisasi daerah sebagai langkah awal membangun mental masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sehingga bisa mencapai *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman. Kebaruan dari penelitian ini adalah mampu memberikan pemahaman terkait kekuatan dan kepentingan dari *stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian *SDGs* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman dengan menggunakan teori analisis *stakeholder* oleh Bryson (2004: 15).

Hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis *stakeholder* dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam membentuk mental masyarakat miskin di Kabupaten Sleman. Tentu hal ini mengakibatkan pencapaian *Sustainable Development Goals* pada tujuan 1 masih belum maksimal. Hasil penelitian ini memberikan implikasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait perbedaan kepentingan antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat merupakan *stakeholder* yang masih memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan Pencapaian *Sustainable Development Goals* terutama pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan, maka peneliti mencoba memberikan rekomendasi atau saran terhadap hasil penelitian. Rekomendasi atau saran tersebut dapat membantu *stakeholder* dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman. Permasalahan pencapaian *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Sleman disebabkan oleh perbedaan kepentingan *stakeholder* yang terlibat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah dapat mengupayakan perubahan dengan memberikan kendali yang lebih besar kepada masyarakat dengan cara memberikan pemahaman dan menyamakan pandangan, visi, misi, serta tujuan dalam mencapai *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Sleman. Tidak hanya masyarakat, akan tetapi peran *stakeholder* swasta juga kemudian harus dikaji ulang, agar pencapaian *Sustainable Development Goals* pada tujuan 1 di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan optimal dan maksimal.

Referensi

- [1] Bryson., John M., and Ackermann., Fran and Eden., Colin (2016). *Menemukan Keuntungan Kolaboratif : Kontribusi Kategori Sasaran dan Pemetaan Strategi Visual Poin Praktisi*.
- [2] Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- [3] Bahtiar, A., & Munandar, A. I. (2021). Stakeholder Analysis Pada Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine Dalam Menghadapi Covid-19 Di Indonesia. 5(April).
- [4] Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2024). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. 9(1), 109–116.
- [5] Eden, Collin. (2021). *1 3456789*. 1001–1025. <https://doi.org/10.1007/s10726-021-09745-y>
- [6] Ijen, G. (2023). *Peran pemangku kepentingan dan faktor- faktor dalam pengelolaan kawasan perbatasan di gunung ijen 1*. 03(November 2022).
- [7] Natalia, M., & Mukti, M. (2014). *Kajian Kemiskinan Pesisir Di Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Nelayan Tambak Lorok)*. 3(1), 50–59.
- [8] Oktavia, S. (2013). *Hubungan Peran stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa*. 01(03), 231–246.
- [9] Pratama, N. B., & Purnomo, E. P. (2020). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Info artikel*. 6(2), 64–74.
- [10] Riau, D. I. (2020). *Kemiskinan Multidimensi Dalam Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)*. 17(1), 24–33.
- [11] Rini, A. S., Sugiharti, L., Airlangga, U., ... Rp, H. P. J. (2020). *The Role Of stakeholders In Poverty Alleviation Of Fisherman Groups In Tanjung Mas Urban Village , North Semarang Sub-District , Semarang City*. Jurnal Samudra Ekonomika, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>.
- [12] Santoso, M. B., & Raharjo, T. (2022). *Diskursus Cor P Orate Soci Al R Esp Onsi Bi Li Ty (Csr) Dalam Mewujudkan Sustai Nable Develop M Ent Goals (SDGs)*. 0042, 100–121. <https://doi.org/10.24198/share.v11i2.37076>.
- [13] Sihombing, P. R., Indonesia, S., & Sinarwati, N. K. (2023). *Korelasi Antar Variabel Makro Penentu Kemiskinan di Indonesia*. February. <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1>
- [14] Stig, C. (2018). The UN Sustainable Development Goals (SDGs) are a great gift to business ! *Procedia CIRP*, 69(May), 21–24. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.01.003>
- [15] Vania Grace Sianturi, M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>.